

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH, PERTUMBUHAN EKONOMI, DAN UPAH MINIMUM TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA BARAT

Faris Delanov Akbar¹⁾, dan Wiwin Priana²⁾

Email: e-mail: delanovakbar@gmail.com¹⁾, wiwinpriana10@gmail.com²⁾

Program Studi Ekonomi
Pembangunan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis

Universitas Pembangunan Negeri “Veteran” Jawa Timur Jl. Rungkut Madya Surabaya

ABSTRAK

This study aims to determine the effect of Regional Expenditure, Economic Growth, and Minimum Wage on Poverty in West Java Province. The data used is secondary data sourced from the Central Bureau of Statistics, Jakarta, Indonesia and the Central Statistics Agency of West Java Province. The secondary data used is 2010-2019. Data analysis used multiple linear regression, from the results of the analysis it is known that regional expenditure has a significant negative effect on poverty, it is known that economic growth has a significant negative effect on poverty and the Minimum Wage has an insignificant positive effect on poverty in West Java Province.

Kata Kunci : *Regional Expenditure, Economic Growth, Minimum Wage, and Poverty*

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang tidak pernah luput dari perhatian pemerintah negara seluruh belahan dunia. Kemiskinan bahkan menjadi suatu fenomena dalam bidang ekonomi yang menjadi titik acuan keberhasilan pemerintah suatu Negara dari waktu ke waktu, khususnya bagi negara berkembang. Hal ini disebabkan oleh minimnya fasilitas, dan sarana penunjang kesejahteraan hidup masyarakat. Indonesia merupakan salah satu negara yang menyadari bahwa persoalan kemiskinan perlu

mendapatkan perhatian lebih dari berbagai pihak terutama bagi pemerintah. Kemiskinan sendiri bahkan menjadi *masterplan* perencanaan pembangunan jangka panjang guna meningkatkan perekonomian dan mengurangi tingkat kemiskinan (Fadillah, Rahmi and Riani, 2022). Kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Kemiskinan sering dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Menurut Mahsunah (2018) kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti pangan, perumahan, pakaian, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Tinjauan kemiskinan dari dimensi ekonomi ini diartikan sebagai ketidak mampuan seseorang untuk mendapatkan mata pencaharian yang mapan dan memberikan penghasilan yang layak untuk menunjang hidupnya secara berkesinambungan yang terlihat dari rendahnya gizi makanan, tingkat kesehatan yang rendah, tingkat pendidikan yang rendah, pakaian yang tidak layak, dan sebagainya.

Pengeluaran pemerintah daerah merupakan nilai pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah, apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pemerintah yang arif akan memanfaatkan anggaran belanjanya untuk pembangunan perekonomian di daerahnya termasuk pengentasan kemiskinan sehingga, terjadi pertumbuhan ekonomi yang baik. Pertumbuhan Ekonomi yang baik adalah indikasi dimana suatu daerah telah berhasil mengentaskan atau mengurangi tingkat kemiskinan, karena pendapatan masyarakatnya terus bertumbuh sehingga kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera dan makmur, dan mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya (Khumairoh *et al.*, 2018). Upah Minimum menjadi salah satu indikator makro ekonomi yang memiliki pengaruh besar terhadap aktivitas perekonomian. Upah Minimum yang tinggi dapat mempengaruhi kestabilan ekonomi dan dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Upah Minimum sendiri merupakan salah satu faktor yang dianggap mampu meningkatkan kemiskinan, hal ini dikarenakan apabila upah minimum naik maka, harga barang-barang umum akan mengalami kenaikan, hal tersebut membuat masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sehingga, hal ini mampu menurunkan kesejahteraan masyarakat (Agung Istri Diah Paramita and Bagus Putu Purbadharmaja, 2016)

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi pendekatan penelitian kuantitatif yang merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data, berupa angkat dan programstatistic (Wahidmurni, 2017).

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Minimum terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2010 hingga 2019. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan variabel intervening.

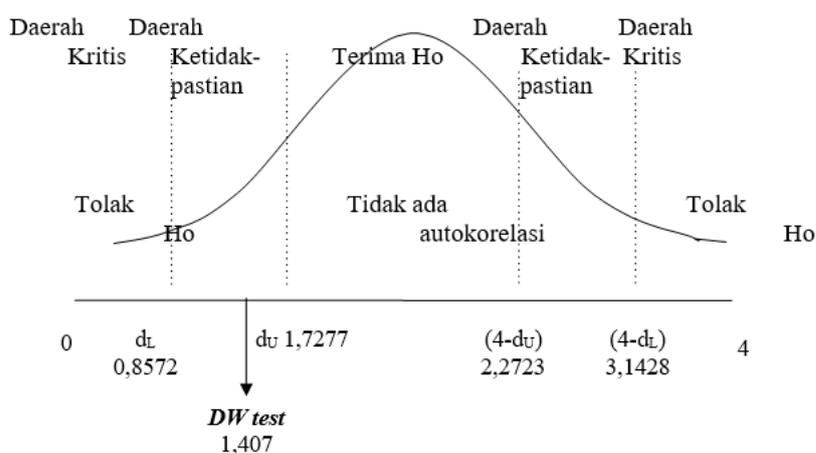
3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Uji Model

a. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Autokorelasi

Ada konsekuensi dalam suatu model regresi adalah varian sampel yang tidak dapat menggambarkan varian populasinya. Cara yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin Watson (*DW Test*). Dengan hasil analisis pada penelitian uji autokorelasi ini diperoleh nilai *DW test* sebesar 1,40. Dalam persamaan ini jumlah variabel bebas (k) adalah 3 dan banyaknya data (n) adalah 10 sehingga diperoleh nilai *DW tabel* adalah sebesar $dL = 0,857$ dan $dU = 1,727$. Untuk mengetahui ada tidaknya gejala autokorelasi dalam model penelitian maka dapat dibuktikan dengan kurva *DW* dibawah ini:



Gambar 1

Kurva Durbin-Watson Test

Berdasarkan hasil perhitungan *Durbin-Watson*, posisi nilai *DW test* sebesar 1,407 berada diantara d_L dan d_U nilai ini lebih besar dari 0. Sehingga, dapat diartikan bahwa pada model uji ini tidak terjadi gejala autokorelasi dikarenakan nilai *DW test* berada di daerah ketidakpastian. Untuk lebih memastikan adanya gejala autokorelasi atau tidak pada penelitian ini, maka peneliti melakukan uji *Run test*, dimana hasilnya sebagai berikut:

Tabel 1
Uji Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value(a)	-31.64394
Cases < Test Value	5
Cases >= Test Value	5
G	10
Number of Runs	3
Z	-1.677
Asymp. Sig. (2-tailed)	.094

Tabel 1 Runs Tes
Sumber: Output SPSS

Dalam Uji Runs Test, dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih kecil < dari 0,05 maka terdapat gejala autokorelasi. Sebaliknya jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar > dari 0,05 maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Dilihat dari tabel 4.5 Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,737 yang berarti $0,05 < 0,737$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi.

Tabel 2
Uji Heterokedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	489,776	451,436		1,085	,320
	Pengeluaran Daerah	1,917E-9	,000	,155	,291	,781
	Pertumbuhan Ekonomi	-78,657	67,331	-,424	-1,168	,287
	Upah Minimum	4,036E-5	,000	,198	,401	,702

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dapat di ketahu bahwa nilai signifikansi dari masing masing variabel adalah :

1. Pengeluaran Daerah : Sig. 0,781 > 0,05
2. Pertumbuhan Ekonomi : Sig. 0,287 > 0,05
3. Upah Minimum : Sig. 0,702 > 0,05

3. Deskriptif Statistik

Tabel 3
Koefisien Determinasi

Model	R Square	Adjusted R Square	Error of the Estimate
1	,895 ^a	,802	,702 226,55206

Sumber : Lampiran Output SPSS, 2023

Berdasarkan hasil uji data tersebut pada kolom R Square sebesar 0,802 artinya bahwa variabel bebas memberikan pengaruh terhadap variabel terikat sebesar 80,2 % sedangkan sisanya 19,8 % dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak digunakan oleh peneliti.

Analisis Of Variance
ANOVA^a

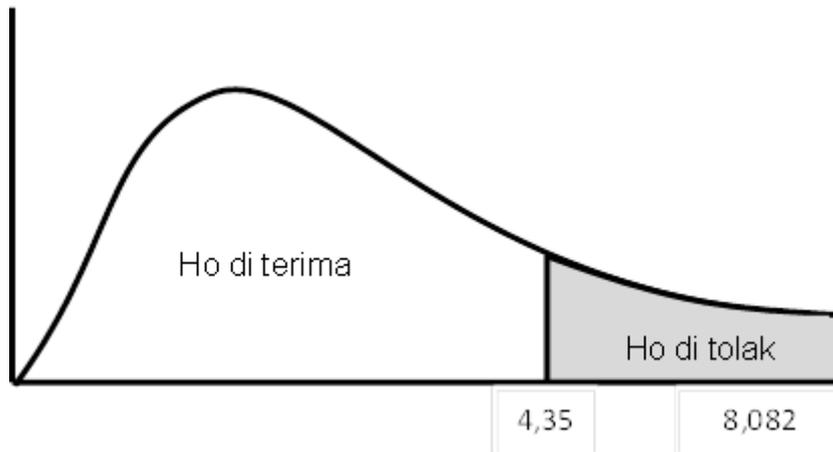
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1244372,916	3	414790,972	8,082	,016 ^b
	Residual	307955,009	6	51325,835		
	Total	1552327,925	9			

a. Dependent Variable: Kemiskinan

b. Predictors: (Constant), Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Daerah

Sumber : Output SPSS, 2023.

Berdasarkan tabel di atas diketahui :



Berdasarkan hasil tersebut dapat di ketahui bahwa F hitung $8,082 > F$ tabel $4,35$. Sehingga variabel Pengeluaran Daerah, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum mampu memberikan pengaruh terhadap Kemiskinan

Uji Hipotesis
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	5560,604	1010,733		5,502	,002
	Pengeluaran Daerah	-4,585E-8	,000	-,973	-3,111	,021
	Pertumbuhan Ekonomi	-43,382	150,748	-,061	-,288	,783
	Upah Minimum	4,822E-5	,000	,062	,214	,838

a. Dependent Variable: Kemiskinan
Sumber : Output SPSS, 2023

b. Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil pengujian maka dapat dibuat model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = 5560,604 + -4,585E-8X_1 + -43,382X_2 + 4,822E-5X_3 + \epsilon$$

Berdasarkan persamaan tersebut maka dapat disimpulkan konstanta bernilai positif $5560,604$ yang artinya apabila variabel Pengeluaran Daerah, Pertumbuhan Ekonomi dan

Upah Minimum tidak mengalami perubahan maka akan menyebabkan variabel kemiskinan meningkat sebesar 5560,604 %.

Variabel Pengeluaran Daerah memiliki nilai negatif $4,585E-8$ yang artinya apabila variabel Pengeluaran daerah meningkat sebesar 1 menyebabkan variabel kemiskinan menurun sebesar 4,585%.

Variabel Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai negatif 43,382 yang artinya apabila variabel pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 1 maka akan menyebabkan variabel kemiskinan menurun sebesar 43,382%.

Variabel Upah minimum memiliki nilai positif $4,822E-5$ yang artinya apabila variabel upah minimum meningkat sebesar 1 maka akan menyebabkan variabel kemiskinan meningkat sebesar 4,822%..

c. Pembahasan

1. Pengaruh Pengeluaran Daerah terhadap Kemiskinan

Variabel pengeluaran daerah memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2010 hingga 2019. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis pada bab sebelumnya yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di provinsi Jawa Barat. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nengah Rai Narka Suda Pratama dan Made Suyana Utama (2019) yang menemukan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. Pengaruh negatif pengeluaran pemerintah terhadap Tingkat Kemiskinan menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan faktor penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan, pengeluaran pemerintah yang bertambah akan mengurangi tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Barat. Pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk konsumsi sektor publik dalam bentuk subsidi dapat dinikmati oleh masyarakat kurang mampu terutama di bidang pendidikan dan kesehatan sehingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia peningkatan kualitas sumber daya manusia pada masyarakat kurang mampu dapat mengentaskan Kemiskinan karena masyarakat kurang mampu akan menjadi lebih produktif sehingga memiliki penghasilan yang lebih baik.

2. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan

Variabel Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap variabel Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2010 hingga 2019. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pangiuk, 2018) yang menjelaskan bahwa Pertumbuhan Ekonomi memiliki berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Menurut Todaro pertumbuhan ekonomi yang seharusnya mengurangi kemiskinan sesuai dengan "*trickle down theory*." Pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan penambahan

kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan tersebut (*ceteris paribus*), yang selanjutnya akan menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan. Pertumbuhan Ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi didalam masyarakat bertambah. Meningkatnya kemampuan ini didasari oleh bertambahnya faktor-faktor produksi baik dalam hal jumlah dan kualitasnya, peningkatan produksi barang maupun jasa di Jawa Barat terbukti dapat mempengaruhi Kemiskinan secara signifikan, hal tersebut diakibatkan karena pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat meningkat secara signifikan sehingga kemiskinan di Jawa Barat berkurang, yang berarti saat pertumbuhan ekonomi meningkat maka kemiskinan akan menurun, sedangkan saat pertumbuhan ekonomi menurun. maka kemiskinan akan meningkat.

3. Pengaruh Upah Minimum terhadap Kemiskinan

Variabel Upah Minimum memberikan pengaruh positif tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2010 hingga 2019. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Islami and Anis, 2019) yang dimana Upah Minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Indonesia, hal tersebut mengartikan bahwa Upah Minimum tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, hal tersebut diakibatkan karena Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat lebih banyak dipengaruhi oleh variabel lain

4. KESIMPULAN

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian serta hasil analisis yang telah diuraikan pada bab IV, maka diperoleh kesimpulan bahwa Pengeluaran Daerah memiliki pengaruh negative signifikan terhadap Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh negative signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dan Upah Minimum memiliki pengaruh yang positif tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Barat. Dengan beberapa saran yang dapat peneliti anjurkan di antaranya adalah agar pemerintah Provinsi dapat lebih maksimal mengalokasikan dan merealisasikan APBD untuk mengentaskan kemiskinan, serta dapat membaca peluang yang ada dari keadaan geografis dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Barat dengan sinergisitas antara masyarakat dengan pemerintah dengan melaksanakan sosialisasi perihal program-program pemerintah, pelaksanaan lahitan kerja, dan lain sebagainya

DAFTAR RUJUKAN

Badan Pusat Statistik . 2020. *Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Menurut Provinsi Tahun Terbitan*. BPS 2020

- Candra Yunita Sari, I. and Supadmi, N. (2016) '*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia*', *E-Jurnal Akuntansi*, 15(3), pp. 2409–2438.
- Christia, A. M. and Ispriyarso, B. (2019) '*Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah Di Indonesia*', *Law Reform*, 15(1), p. 149. doi:10.14710/lr.v15i1.23360.
- Ningrum, J. W., Khairunnisa, A. H. and Huda, N. (2020) '*Pengaruh Kemiskinan ,Tingkat Pengangguran , Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Tahun 2014-2018 dalam Perspektif Islam*', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(02), pp. 212–222.
- Pengangguran, P. *et al.* (2013) '*Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011*', *EconomicsDevelopment Analysis Journal*, 2(3), pp. 85–98. doi: 10.15294/edaj.v2i3.1984.
- Prasetyoningrum, A. K. (2018) '*Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipm), Pertumbuhan Ekonomi, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia*', *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), p. 217. doi: 10.21043/equilibrium.v6i2.3663.
- Sarkoro, H. and Zulfikar, Z. (2018) '*Dana Alokasi khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Tahun2012-2014)*', *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1(1), pp. 54–63. doi: 10.23917/reaksi.v1i1.1972.
- Maryati,Ulfi dan Endrawati.2010.Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi:Studi Kasus Sumatera Barat.Jurnal Akuntansi dan Manajemen,vol 5, No 2.
- Wahidmurni.(2017) ' Pemaparan Metode Penelitian Kuantitatif ', E-Jurnal PIPS UIN MALANG
- Wijayanti, N. and Darsana, I. (2013) '*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Periode 2008-2013)*', *E-Jurnal EP Unud*, 4[3], pp. 1164–1193.